

Beyond GDP

Menilai Kemajuan Dunia
melalui **Kesejahteraan Manusia**



Oleh
Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

12 April 2026

BEYOND GDP: MENILAI KEMAJUAN DUNIA MELALUI KESEJAHTERAAN MANUSIA

Abstrak

Makalah ini membahas perlunya pergeseran paradigma dari penilaian kemajuan yang bertumpu terutama pada Produk Domestik Bruto (GDP) menuju kerangka yang lebih luas, yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai pusat evaluasi pembangunan. Tesis utama tulisan ini adalah bahwa GDP tetap berguna sebagai ukuran output ekonomi, tetapi tidak memadai untuk menangkap mutu kehidupan, distribusi manfaat pembangunan, ketahanan sosial, kualitas lingkungan, kerja layak, rasa aman, maupun peluang antargenerasi. Dorongan untuk bergerak "beyond GDP" kini tidak lagi datang hanya dari perdebatan akademik, tetapi juga dari lembaga-lembaga resmi global. OECD secara eksplisit menyatakan bahwa GDP tidak memberi tahu apakah hidup benar-benar membaik dan bagi siapa; UNDP menegaskan bahwa manusia dan kapabilitasnya harus menjadi ukuran akhir pembangunan, bukan pertumbuhan ekonomi semata; World Bank mengembangkan ukuran shared prosperity baru karena pertumbuhan rata-rata pendapatan saja tidak cukup; dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk High-Level Expert Group on Beyond GDP setelah Pact for the Future untuk merumuskan metrik pelengkap GDP. Dalam konteks global yang ditandai perlambatan pertumbuhan, stagnasi kemajuan pembangunan manusia, kemiskinan yang masih besar, menurunnya labour income share, dan tekanan sosial-

ekologis, tulisan ini berargumen bahwa masa depan pengukuran kemajuan harus bersifat multidimensi: menggabungkan kesejahteraan material, kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, keamanan ekonomi, kesetaraan, kohesi sosial, dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. GDP perlu dipertahankan, tetapi harus ditempatkan sebagai alat, bukan tujuan akhir. ([OECD](#))

Kata kunci: *GDP, beyond GDP, kesejahteraan manusia, pembangunan manusia, kemajuan global, keadilan sosial, keberlanjutan, shared prosperity.*

Beyond GDP:

Menilai Kemajuan Dunia melalui Kesejahteraan Manusia

1. Pendahuluan

Selama puluhan tahun, GDP menjadi simbol utama keberhasilan ekonomi. Negara yang GDP-nya tumbuh dianggap maju, sementara negara yang pertumbuhannya lambat dianggap tertinggal. Cara pandang ini mempunyai dasar yang kuat: GDP memang berguna untuk mengukur nilai output barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian, membaca siklus bisnis, mengamati resesi atau ekspansi, dan membantu pemerintah maupun bank sentral merancang kebijakan makroekonomi. Namun persoalannya muncul ketika GDP diperlakukan bukan sekadar alat statistik, melainkan sebagai definisi kemajuan itu sendiri. Pada titik itulah ukuran yang semestinya teknis berubah menjadi ideologi penilaian pembangunan. ([OECD](#))

Krisis abad ke-21 memperlihatkan dengan semakin jelas bahwa kemajuan manusia tidak dapat direduksi menjadi output ekonomi. IMF memperkirakan pertumbuhan global melambat dari 3,3 persen pada 2024

menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026. Pada saat yang sama, UNDP melaporkan bahwa nilai global Human Development Index untuk 2024 memang diproyeksikan mencapai rekor tertinggi, tetapi kenaikannya menjadi yang terendah sejak pencatatan dimulai 35 tahun lalu, dan kesenjangan antara negara low HDI dan very high HDI justru melebar dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kata lain, dunia masih bertumbuh, tetapi kemajuan manusianya tidak bergerak dengan mutu dan kecepatan yang sama. ([IMF](#))

Dari sudut pandang ini, kritik terhadap GDP bukanlah penolakan terhadap ekonomi, melainkan koreksi terhadap penyempitan arti pembangunan. OECD menegaskan bahwa GDP adalah alat yang mapan untuk mengukur output ekonomi, tetapi tidak memberi tahu apakah hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik, dan bagi siapa. World Bank juga menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan rata-rata saja bukan penanda pembangunan yang memadai, sehingga perlu pelacakan terhadap shared prosperity. Bahkan PBB kini memberi dorongan politik baru pada agenda tersebut: setelah Pact for the Future 2024, Sekretaris Jenderal membentuk High-Level Expert Group on Beyond GDP pada Mei 2025, dan laporan sementara pada November 2025 menekankan bahwa GDP gagal menangkap dimensi-dimensi penting seperti degradasi lingkungan, kerja perawatan tak berbayar, ketimpangan ekstrem, dan pengalaman hidup warga. ([OECD](#))

Makalah ini berangkat dari pertanyaan mendasar: jika GDP tidak cukup, lalu bagaimana seharusnya kemajuan dunia dinilai? Jawaban yang diajukan di sini adalah bahwa kemajuan harus diukur melalui kesejahteraan manusia. Artinya, keberhasilan pembangunan perlu dinilai dari kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, berpendidikan, aman secara ekonomi, terlindungi secara sosial, memiliki kualitas lingkungan yang layak, menikmati peluang yang adil, dan mewariskan kondisi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Karena itu, "beyond GDP" bukan sekadar

mengganti satu angka dengan angka lain, melainkan mengubah orientasi pembangunan dari akumulasi output menuju perluasan kualitas hidup.

2. GDP: kegunaan yang nyata, tetapi ruang baca yang sempit

Secara metodologis, GDP tetap memiliki nilai penting. Ia memungkinkan perbandingan kinerja ekonomi antarkuartal, antartahun, dan antarnegara. Ia membantu menilai kapasitas fiskal, basis pajak, produktivitas agregat, dan stabilitas makroekonomi. Dalam praktik kebijakan, hampir mustahil membayangkan pemerintah modern, bank sentral, atau lembaga internasional bekerja tanpa statistik GDP. Karena itu, agenda beyond GDP tidak dimaksudkan untuk meniadakan GDP, melainkan menempatkannya secara proporsional. Laporan interim High-Level Expert Group PBB justru menekankan perlunya "preserve public trust in GDP while complementing it." Ini penting: kritik terhadap GDP menjadi konstruktif hanya bila ia tidak jatuh ke anti-statistik, melainkan memperluas sistem pengukuran. ([UNSD](#))

Masalah utama GDP terletak pada apa yang tidak dilihatnya. Pertama, GDP tidak menunjukkan distribusi. Dua negara dapat memiliki GDP per kapita yang sama, tetapi salah satunya jauh lebih timpang, sehingga kualitas hidup mayoritas warganya jauh lebih buruk. Kedua, GDP tidak menangkap banyak aktivitas yang menopang kehidupan, seperti kerja perawatan dalam rumah tangga, pengasuhan, atau dukungan komunitas, padahal semua itu memiliki nilai sosial yang sangat besar. Ketiga, GDP tidak mengurangi biaya kerusakan ekologis, sehingga ekonomi yang menebangi hutan, mencemari udara, atau menguras air tanah dapat tampak "bertumbuh" meskipun sesungguhnya sedang menggerogoti fondasi kehidupan. Keempat, GDP tidak mencerminkan pengalaman subjektif manusia seperti rasa aman, kesehatan mental, kesepian, atau kepercayaan sosial. Kelima, GDP tidak cukup peka terhadap ketahanan masa depan: suatu negara dapat membukukan pertumbuhan tinggi sambil melemahkan modal alam, modal sosial, atau kualitas institusinya. ([UNSD](#))

UNDP merumuskan persoalan ini dengan sangat jernih. Menurut Human Development Reports, human development adalah tentang memperluas kekayaan hidup manusia, bukan semata kekayaan ekonomi tempat manusia hidup. Pendapatan dipandang sebagai sarana menuju pembangunan, bukan tujuan itu sendiri. Pada laman resmi HDI, UNDP bahkan menyatakan bahwa indeks tersebut diciptakan untuk menekankan bahwa manusia dan kapabilitasnya harus menjadi kriteria akhir dalam menilai pembangunan negara, bukan pertumbuhan ekonomi saja.

Pernyataan ini penting secara filosofis karena memulihkan hierarki tujuan: ekonomi ada untuk kehidupan manusia, bukan manusia untuk ekonomi.

([Human Development Reports](#))

Keterbatasan GDP menjadi semakin kentara ketika krisis datang. OECD dalam *How's Life? 2024* menunjukkan bahwa pasca-2019 banyak kondisi material yang sebelumnya membaik kini stagnan; terdapat tanda-tanda peringatan pada berbagai aspek nonmaterial kesejahteraan sejak 2019; dan ada peringatan bagi ketahanan kesejahteraan masa depan, khususnya terkait modal alam dan modal sosial. Artinya, sekalipun perekonomian dapat menunjukkan pemulihan atau stabilitas secara agregat, mutu kehidupan sehari-hari belum tentu membaik dengan arah yang sama. Ini salah satu alasan mengapa GDP sering terlambat atau terlalu sempit dalam membaca kenyataan hidup. ([OECD](#))

3. Mengapa dunia kini bergerak “beyond GDP”?

Dorongan global untuk melampaui GDP kini bersifat institusional, bukan sekadar wacana akademik. OECD secara terbuka menyebut kerangka kesejahteraannya sebagai alat untuk memonitor kemajuan sosial “beyond GDP” dan menginformasikan kebijakan yang people-centric serta terintegrasi. OECD juga menegaskan bahwa kerangka itu relevan dalam konteks transisi ekologis dan digital, serta membantu memahami bukan hanya apakah kehidupan membaik, tetapi juga apakah manfaat kemajuan

dibagikan secara setara dan apakah sumber daya untuk masa depan tetap terjaga. ([OECD](#))

Momentum yang sama juga tampak di PBB. High-Level Expert Group on Beyond GDP dibentuk pada Mei 2025, dan laporan sementara pada November 2025 menyebut kebutuhan mendesak akan “kompas baru” karena GDP gagal menangkap dimensi penting kemajuan abad ke-21. Kelompok ini mengusulkan kerangka tiga pilar: **well-being, equity and inclusion**, dan **sustainability**. Dalam kata lain, kemajuan tidak cukup dinilai dari seberapa banyak output yang dihasilkan, tetapi juga harus menilai bagaimana hidup orang berjalan, apakah manfaatnya dibagi secara adil, dan apakah generasi mendatang masih memiliki basis kehidupan yang layak. ([UNSD](#))

World Bank bergerak ke arah serupa dari sisi kemiskinan dan kemakmuran bersama. Lembaga ini menilai bahwa pertumbuhan pendapatan rata-rata saja bukan penanda pembangunan yang cukup, sehingga pada 2023 mengadopsi dua ukuran baru untuk memantau shared prosperity, salah satunya Global Prosperity Gap (GPG). GPG didefinisikan sebagai faktor rata-rata pengali pendapatan yang dibutuhkan agar seluruh orang mencapai standar kemakmuran US\$25 per hari. Pada 2024, World Bank mencatat bahwa secara global pendapatan manusia rata-rata perlu meningkat sekitar lima kali lipat untuk mencapai ambang tersebut. Ini menunjukkan bahwa dunia tidak cukup dinilai dari total kekayaannya, tetapi dari seberapa jauh manusia nyata masih tertinggal dari kehidupan yang layak. ([World Bank](#))

Pergeseran ini juga diperkuat oleh realitas sosial global. Laporan SDG 2025 memperkirakan bahwa 808 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2025 menurut garis internasional yang diperbarui, lebih dari 240 juta pekerja masih hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2024, dan 3,8 miliar orang tetap tidak terlindungi oleh manfaat perlindungan sosial apa pun pada 2023. Secara bersamaan, bagian labour income dalam GDP global

turun dari 52,9 persen pada 2015 menjadi 52,3 persen pada 2024. Data-data ini menegaskan bahwa ekspansi ekonomi agregat tidak otomatis berubah menjadi keamanan sosial, perlindungan, atau bagian yang adil bagi pekerja. ([UNSD](#))

4. Kesejahteraan manusia sebagai ukuran kemajuan

Jika GDP tidak cukup, maka pertanyaan berikutnya adalah: apa yang harus diukur? Jawabannya bukan satu angka tunggal baru, melainkan suatu arsitektur pengukuran yang lebih multidimensi. Kesejahteraan manusia tidak identik dengan pendapatan. Ia mencakup kesehatan, pendidikan, keamanan ekonomi, kualitas kerja, relasi sosial, rasa aman, kualitas lingkungan, partisipasi, serta peluang untuk masa depan. Karena itu, agenda beyond GDP bukan sekadar proyek statistik, tetapi proyek konseptual mengenai apa yang dianggap penting dalam hidup manusia.

4.1 Pembangunan manusia: HDI dan pendekatan kapabilitas

Salah satu tonggak terpenting dalam melampaui GDP adalah Human Development Index. Menurut UNDP, HDI adalah ukuran ringkas capaian rata-rata dalam tiga dimensi kunci pembangunan manusia: hidup yang panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. UNDP menegaskan bahwa HDI diciptakan untuk mengoreksi pandangan yang menilai pembangunan hanya dari pertumbuhan ekonomi, dan bahwa indeks ini dapat memicu pertanyaan kebijakan ketika dua negara dengan GNI per kapita serupa ternyata menghasilkan outcome manusia yang berbeda. Namun UNDP juga mengakui keterbatasan HDI: indeks ini tidak sepenuhnya menangkap ketimpangan, kemiskinan, keamanan manusia, pemberdayaan, dan dimensi lain yang lebih luas. ([Human Development Reports](#))

Kekuatan utama HDI adalah ia menggeser perhatian dari "berapa kaya negara" menjadi "apa yang dapat dijalani manusia." Dengan HDI, pendidikan dan kesehatan tidak lagi diperlakukan sebagai efek samping

pertumbuhan, tetapi sebagai inti pembangunan itu sendiri. Ini merupakan lompatan intelektual yang besar. Namun di era sekarang, HDI juga perlu diperkaya dengan metrik tambahan, misalnya ketimpangan, kemiskinan multidimensi, tekanan planet, dan kualitas institusi, agar gambaran kemajuan tidak terlalu rata-rata dan tidak terlalu diam terhadap beban lingkungan. UNDP sendiri kini menyediakan indeks dan dashboard tambahan tentang ketimpangan, gender, kemiskinan, dan planetary pressures. ([Human Development Reports](#))

4.2 Shared prosperity: dari pertumbuhan rata-rata ke jarak dari kemakmuran

Sumbangan penting lain datang dari World Bank. Bila pertumbuhan rata-rata tidak cukup, maka fokus harus bergeser pada pertumbuhan yang dirasakan kelompok bawah dan pada jarak nyata dari kehidupan yang dianggap makmur. Karena itu World Bank tidak hanya memantau pertumbuhan 40 persen penduduk terbawah, tetapi juga memperkenalkan Global Prosperity Gap. Keunggulan pendekatan ini adalah ia menggabungkan dua keprihatinan sekaligus: level pendapatan dan distribusi. GPG membaik bila pendapatan meningkat atau ketimpangan menurun, dan memburuk bila ketimpangan meningkat. Dengan demikian, ukuran ini lebih dekat kepada gagasan kemajuan yang inklusif. ([World Bank](#))

Dalam perspektif normatif, pendekatan shared prosperity penting karena ia menolak kebanggaan prematur pada angka agregat. Sebuah dunia yang sangat kaya tetapi masih menyisakan jurang kemakmuran yang besar tidak dapat dikatakan berhasil. Dengan memakai standar kemakmuran, pertanyaan kebijakan menjadi lebih tajam: bukan hanya seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi berapa jauh masyarakat—terutama kelompok miskin—dari standar hidup yang benar-benar layak.

4.3 Kerangka OECD: kesejahteraan kini dan sumber daya bagi masa depan

OECD menyediakan salah satu kerangka paling matang untuk mengukur kemajuan beyond GDP. *How's Life? 2024* menggunakan lebih dari 80 indikator yang mengoperasionalkan 11 dimensi current well-being dan empat jenis modal atau resources for future well-being. Dimensi current well-being mencakup kondisi material seperti pendapatan dan kekayaan, kualitas kerja, dan perumahan, sekaligus kualitas hidup seperti kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, kualitas lingkungan, kesejahteraan subjektif, keamanan, serta relasi sosial. Kerangka ini menarik karena tidak hanya menilai "di sini dan saat ini," tetapi juga stok modal ekonomi, alam, manusia, dan sosial yang menopang kesejahteraan pada masa mendatang. ([OECD](#))

Keunggulan OECD adalah keberaniannya memasukkan dimensi-dimensi yang lama dianggap "lunak" atau sulit diukur, seperti subjective well-being, trust, loneliness, dan social connectedness. OECD bahkan memperbarui pedoman resmi pengukuran subjective well-being pada 2025 dan terus menutup kesenjangan data pada bidang-bidang seperti mental health dan social connectedness. Dari sini tampak bahwa kemajuan statistik telah memungkinkan aspek-aspek pengalaman manusia yang dulu dianggap tidak terukur kini masuk ke arena kebijakan publik. ([OECD](#))

Lebih jauh lagi, *How's Life? 2024* menunjukkan bahwa pasca-2019 banyak indikator nonmaterial memburuk atau menunjukkan risiko penurunan, meskipun pendapatan rata-rata dan employment outcomes relatif lebih tangguh karena intervensi pemerintah. Pelajaran pentingnya adalah bahwa kualitas hidup tidak selalu bergerak searah dengan indikator ekonomi makro. Inilah alasan mengapa dashboard kesejahteraan jauh lebih kaya secara diagnostik daripada GDP semata. ([OECD](#))

4.4 SDGs sebagai dashboard kemajuan yang lebih komprehensif

Agenda Sustainable Development Goals juga pada dasarnya adalah proyek beyond GDP. Laporan SDG 2025 adalah satu-satunya laporan resmi PBB yang memantau kemajuan global terhadap Agenda 2030, dan ia

mengintegrasikan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketimpangan, pekerjaan, lingkungan, energi, serta institusi. Nilai strategis SDGs terletak pada sifatnya yang multidimensi dan universal. Ia memaksa dunia melihat bahwa kemajuan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal siapa yang tertinggal, siapa yang terlindungi, siapa yang terdampak diskriminasi, dan seberapa aman masa depan ekologis kita. ([UNSD](#))

Namun dashboard SDGs juga mengingatkan bahwa pengukuran yang lebih luas membawa tantangan baru: kompleksitas. Banyak indikator berarti banyak informasi, tetapi juga risiko kebingungan, prioritas yang kabur, dan beban data yang besar bagi negara berkapasitas statistik rendah. Karena itu, agenda beyond GDP membutuhkan keseimbangan antara kedalaman analitik dan kesederhanaan komunikasi.

5. Tantangan metodologis dalam melampaui GDP

Salah satu kritik yang sering muncul terhadap pendekatan beyond GDP adalah bahwa semakin banyak indikator, semakin sulit membuat keputusan. GDP unggul karena sederhana, familiar, dan punya legitimasi kuat. Sebaliknya, kesejahteraan manusia bersifat multidimensi, sehingga tidak mudah diringkas tanpa kehilangan nuansanya. Inilah dilema utama: bila indikator dibuat terlalu sedikit, ia terlalu kasar; bila terlalu banyak, ia sulit dipakai dalam praktik. High-Level Expert Group PBB sendiri mengakui pentingnya indikator yang kuat secara ilmiah tetapi tetap cukup sederhana untuk dipantau dan dikomunikasikan, serta tetap fleksibel terhadap konteks nasional. ([UNSD](#))

Tantangan kedua adalah soal komparabilitas. Ukuran seperti GDP relatif seragam secara internasional, sedangkan banyak dimensi kesejahteraan—misalnya trust, life satisfaction, rasa aman, kualitas relasi sosial, atau persepsi diskriminasi—bergantung pada metode survei, budaya, dan kualitas statistik nasional. OECD mencoba menjawab persoalan ini dengan membangun standar dan pedoman pengukuran subjective well-being, namun tetap mengakui bahwa data internasional yang harmonis masih

terbatas di beberapa bidang. Jadi, beyond GDP tidak hanya soal visi normatif, tetapi juga investasi jangka panjang dalam kapasitas statistik nasional. ([OECD](#))

Tantangan ketiga bersifat politis. Mengubah apa yang diukur berarti mengubah apa yang diprioritaskan. Bila pemerintah dinilai hanya dari pertumbuhan GDP, maka kebijakan akan cenderung mengejar ekspansi output. Namun bila pemerintah juga dinilai dari ketimpangan, kualitas udara, keamanan kerja, kesehatan mental, dan perlindungan sosial, maka struktur insentif kebijakan akan berubah. Karena itu, perdebatan beyond GDP sesungguhnya adalah perdebatan tentang arah politik pembangunan. Ia menuntut keberanian untuk mengakui bahwa apa yang selama ini diperlakukan sebagai “kemajuan” mungkin sesungguhnya hanya salah satu bagiannya.

6. Implikasi kebijakan: bagaimana menilai kemajuan dunia secara lebih manusiawi?

Pertama, GDP perlu tetap dipakai, tetapi diletakkan dalam panel indikator, bukan di singgasana tunggal. Negara memerlukan ukuran output, tetapi juga ukuran distribusi, kualitas hidup, keamanan ekonomi, dan keberlanjutan. Secara praktis, ini berarti laporan pembangunan nasional dan internasional seharusnya menampilkan GDP bersama HDI, kemiskinan multidimensi, labour income share, social protection coverage, kualitas udara, capaian pendidikan, dan indikator kesejahteraan subjektif. Pendekatan semacam ini lebih jujur terhadap kompleksitas hidup manusia. ([Human Development Reports](#))

Kedua, anggaran publik dan evaluasi kebijakan perlu semakin ditautkan pada outcome kesejahteraan, bukan hanya output ekonomi. OECD menegaskan bahwa kerangka kesejahteraan membantu desain kebijakan yang mempromosikan sinergi antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan kata lain, pemerintah harus dinilai tidak hanya dari seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi juga dari seberapa efektif mereka

memperbaiki kesehatan, pendidikan, kualitas kerja, akses perumahan, kepercayaan sosial, dan ketahanan masa depan. ([OECD](#))

Ketiga, dunia memerlukan keadilan statistik. Banyak negara berpendapatan rendah paling membutuhkan ukuran kesejahteraan yang baik, tetapi justru mempunyai kapasitas data paling lemah. PBB dalam agenda beyond GDP menekankan perlunya investasi serius dalam kapasitas statistik. Tanpa itu, negara miskin akan terus dinilai dengan alat yang sempit, sementara persoalan mereka yang paling mendalam tetap tidak terlihat. Dalam politik pembangunan, apa yang tidak diukur sering kali tidak diprioritaskan. ([The United Nations in Indonesia](#))

Keempat, orientasi beyond GDP menuntut perubahan etika pembangunan global. Ketika laporan SDG menunjukkan 808 juta orang masih miskin ekstrem, 3,8 miliar orang belum terlindungi sistem perlindungan sosial, dan labour income share terus menurun, maka jelas bahwa pertumbuhan output global belum cukup diterjemahkan menjadi keamanan hidup bagi miliaran manusia. Menilai kemajuan dunia melalui kesejahteraan manusia berarti menggeser pertanyaan dari “berapa cepat dunia tumbuh?” menjadi “siapa yang hidup lebih aman, lebih sehat, lebih bebas, dan lebih berdaya karena pertumbuhan itu?” ([UNSD](#))

7. Kesimpulan

Makalah ini menegaskan bahwa GDP tetap penting, tetapi tidak memadai sebagai ukuran tunggal kemajuan dunia. Ia berguna untuk menangkap output ekonomi, tetapi tidak cukup untuk membaca distribusi, kualitas hidup, kerja perawatan tak berbayar, kerusakan lingkungan, keamanan sosial, atau ketahanan antargenerasi. Dalam dunia yang ditandai perlambatan pertumbuhan global, stagnasi pembangunan manusia, kemiskinan yang masih besar, turunnya bagian pendapatan tenaga kerja, dan rapuhnya perlindungan sosial, mempertahankan GDP sebagai pusat tunggal penilaian pembangunan berarti terus memakai kompas yang terlalu sempit untuk realitas yang semakin kompleks. ([IME](#))

Karena itu, agenda beyond GDP harus dibaca sebagai pendalaman, bukan pembatalan, ilmu pembangunan. OECD, UNDP, World Bank, dan PBB kini bergerak ke arah yang sama: kemajuan harus dinilai melalui kesejahteraan manusia. Artinya, keberhasilan pembangunan harus terlihat pada hidup yang lebih sehat, pendidikan yang lebih baik, kerja yang lebih layak, distribusi yang lebih adil, perlindungan sosial yang lebih kuat, lingkungan yang lebih aman, dan sumber daya yang tetap terjaga bagi generasi mendatang. ([OECD](#))

Dengan demikian, rumusan akhirnya sederhana tetapi mendasar: **GDP harus tetap dihitung, tetapi kemajuan dunia harus dinilai lebih luas daripada GDP.** Dunia tidak membutuhkan statistik yang lebih miskin makna, melainkan statistik yang lebih dekat dengan kenyataan hidup manusia. Hanya dengan begitu pembangunan dapat kembali pada pertanyaan aslinya: bukan semata seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi seberapa bermartabat manusia dapat hidup di dalamnya.

Glosarium

Beyond GDP

Pendekatan pengukuran kemajuan yang melampaui output ekonomi semata dan memasukkan kesejahteraan, distribusi, keberlanjutan, dan kualitas hidup.

GDP (Gross Domestic Product / Produk Domestik Bruto)

Nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama periode tertentu.

HDI (Human Development Index)

Indeks ringkas yang mengukur pembangunan manusia melalui tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Shared prosperity

Pendekatan yang menilai seberapa inklusif pertumbuhan ekonomi, terutama dari sudut kelompok bawah.

Global Prosperity Gap

Ukuran World Bank mengenai seberapa jauh pendapatan masyarakat dari standar kemakmuran US\$25 per hari.

Subjective well-being

Penilaian individu terhadap kehidupannya sendiri, termasuk kepuasan hidup, afek, dan rasa bermakna.

Labour income share

Bagian pendapatan nasional atau GDP yang mengalir kepada tenaga kerja dalam bentuk upah dan kompensasi kerja.

Social protection

Sistem manfaat dan perlindungan untuk menghadapi risiko seperti kemiskinan, pengangguran, usia tua, disabilitas, atau guncangan ekonomi.

Current well-being

Kondisi kesejahteraan yang dialami masyarakat pada masa kini, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Resources for future well-being

Sumber daya yang menopang kesejahteraan masa depan, seperti modal ekonomi, manusia, alam, dan sosial.

Referensi (APA 7)

International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook, October 2025: Global economy in flux, prospects remain dim*. IMF.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *How's life? 2024*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Measuring well-being and progress*. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *OECD well-being data monitor*.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *OECD guidelines on measuring subjective well-being: 2025 update*. OECD Publishing.

United Nations. (2025). *High-Level Expert Group on Beyond GDP: Interim progress report*. United Nations.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2025). *The Sustainable Development Goals Report 2025*. United Nations.

United Nations Development Programme. (2025). *Human Development Report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI*. UNDP.

United Nations Development Programme. (2025). *Human development: What is human development?* UNDP Human Development Reports.

United Nations Development Programme. (2025). *Human Development Index (HDI)*. UNDP Human Development Reports.

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet: Pathways out of the polycrisis*. World Bank.

World Bank. (2025). *Growth of the bottom 40: Monitoring inclusive growth*. World Bank.

Rudy C Tarumingkeng: *Beyond GDP: Menilai Kemajuan Dunia melalui Kesejahteraan Manusia*

World Bank. (2025). *Global prosperity gap: The World Bank's new measure for shared prosperity*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 12 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d6386a-621c-83a0-bebe-7b2a4b62b7c5>